



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIRATNO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 209250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.535.000.000
1. Tanah Seluas 150 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/21 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/70 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT HONDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.650.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	198.051.186
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	1.846.701.186
III. HUTANG	Rp.	238.347.351
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.608.353.835

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HEDI MEDIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 465445

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/56 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

1. MOBIL, AVANZA G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 177.450.738

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 794.450.738

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 794.450.738

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINITASARI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 414535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	463.440.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/72 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 463.440.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	37.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000		
2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 34.250.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	298.060.609
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	798.500.609
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	798.500.609

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUPUNG PURNAMAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 225383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.100.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOTOR, HONDA X1B02R07L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 28D MIO AL1155A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.490.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.011.215

F. HARTA LAINNYA Rp. 712.412

Sub Total Rp. 272.313.627

III. HUTANG Rp. 209.045.844

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 63.267.783

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR MASLAHAH
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 207280

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/96 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	168.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	78.158.046
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	576.158.046
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	576.158.046

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.